

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Sejarah Timor Timur adalah sejarah konflik. Berita mengenai Timor Timur banyak dibaca, didengar, atau ditayangkan media pers. Berita apa? Konflik dan pertentangan! Dan sejarah pertentangan ini merupakan sejarah panjang yang seakan-akan tidak akan pernah dihentikan. Sejarah yang bisa dirunut kemasa lalu sebelum bangsa Timor Timur bersentuhan dengan bangsa Barat.¹

Timor Timur merupakan sebuah negara baru yang telah berhasil melepaskan diri dari Indonesia melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 lalu. Tentunya hasil tersebut sangat mengejutkan pemerintah Indonesia karena sudah sangat banyak sekali biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk berusaha membangun propinsi termuda di Indonesia tersebut, agar dapat mengembangkan dan memajukan sumber daya yang ada di propinsi Timor Timur semaksimal mungkin.

Hasil tersebut disebabkan adanya pertikaian yang terjadi antara pihak Fretilin untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan pemerintah Indonesia yang menganggap Fretilin sebagai gerakan separatis yang harus dipadamkan dengan menggunakan pendekatan militer oleh pemerintah saat itu, sehingga dinilai menimbulkan banyak pelanggaran HAM terhadap masyarakat Timor Timur, ketika isu Hak Asasi Manusia menjadi isu yang sangat penting dalam politik internasional.

¹ Zacki Anwar Makarim, Glenni Kauripan, Andreas Sugiyanto, Ibnu Fatah, *Hari-Hari Terakhir Timor Timur*, Sebuah Kisah Perjuangan Timor Timur.

Keberhasilan Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri membuktikan bahwa isu pelanggaran HAM di Timor Timur oleh TNI dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pejuang kemerdekaan Timor Timur untuk menyakinkan pada dunia internasional bahwa Timor Timur berhak untuk menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri.

Berdasarkan sebab di atas, maka dalam penelitian ini, penulis memberi judul: **Isu Hak Asasi Manusia Sebagai Kunci Kemenangan Fretilin dalam Konflik Timor Timur.**

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi yang diberi judul **Isu HAM Sebagai Kunci Kemenangan Fretilin dalam Konflik Timor Timur** adalah:

- Memberikan gambaran yang obyektif tentang sebab-sebab isu HAM menjadi kunci kemenangan Fretilin dalam perjuangan diplomasi di dunia Internasional.
- menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah serta dengan tujuan untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang kesarjanaaan di Jurusan Ilmu Hubungan Intenasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Konsep HAM telah mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali dicetuskan secara internasional tahun 1948. Perkembangan konsep dan pemikiran itu antara lain disebabkan oleh perkembangan pandangan tentang persoalan apa yang dapat mengancam dan apa yang diperlukan untuk mengatasinya.² Pelanggaran HAM mendapatkan perhatian utama masyarakat internasional sehubungan dengan perubahan kondisi internasional paska Perang Dingin, yang menjadikan isu HAM sebagai komoditas kampanye politik internasional yang krusial. Orientasi global tidak lagi mengkonsentrasikan pada masalah-masalah politik sebagai ganti isu melawan komunisme, AS dan negara-negara Eropa Barat menempatkan isu-isu demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup sebagai bahan kampanye menekan negara-negara lain.³

Timor Timur sebagai salah satu bagian pemerintahan Indonesia yang kurang begitu di kenal dunia, telah banyak menimbulkan kontroversi mulai dari awal Integrasinya dengan Indonesia pada 1976 sampai dengan lepasnya pada tahun 1999. Kontroversi yang terjadi berawal dengan adanya dugaan bahwa Integrasi Timor Timur pada 1976 penuh dengan rekayasa serta tidak mempunyai pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan secara de-facto maupun de-jure wilayah Timor Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya Indonesia sudah melihat kedudukan Timor Timur sebagai suatu *trouble corner* yang dapat menjadi “duri dalam daging” bagi rakyat Indonesia. Disebut sebagai *trouble corner* karena di pojok tenggara

² Kompas, 23 Desember 1999

³ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Hak Asasi Manusia: Kasus Indonesia dengan Timor Timur*, Analisis CSIS tahun XXXIX/2000, No. 2, Jakarta, 2000, hal. 176

kepulauan tersebut masih bercokol praktek kolonialisme, yang tidak tertutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.⁴

Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses integrasi yang diduga penuh dengan rekayasa baik secara politik maupun militer. Jauh sebelum Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia, pada 17 Juli 1976, wilayah ini telah tercerai berai oleh rentannya politik *divide et impera*. Akibatnya selama 450 tahun Portugal mampu menancapkan kukunya diwilayah itu. Pada 1910 terjadi pemberontakan terbesar dan terakhir yang dilakukan rakyat Timor Timur sebelum Perang Dunia II. Pemberontakan ini dikenal dengan Perang Manufahi (1910-1912). Para raja lokal bersatu dibawah kepemimpinan seorang *Liurai* (raja) Same bernama Dom Boaventura. Portugal dipaksa mendatangkan pasukan dari Mozambique dan Macau. Sekitar 3.000 orang Timor terbunuh dan 4.000 lainnya ditawan Portugal. Setelah Perang Manufahi, Portugal menerapkan kebijakan baru yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan dan kekerabatan tradisional Timor Timur. Posisi Liurai dipotong dengan cara menghapus kerajaan mereka. Daerah koloni dipecah kedalam unit-unit administrasi wilayah *suco*, dengan menciptakan dua tingkat adminisrasi baru, yaitu posto (terdiri dari kelompok *suco*) dan *concelho* (yang mengontrol posto melalui seorang administrator Portugis). Kekuasaan para Liurai lambat laun mulai memudar.

Pada 25 april 1974 terjadi Revolusi Anyelir di Portugal yang dipelopori oleh para perwira muda berhaluan kiri yang tergabung dalam *Movimento das*

Forças Armadas (MFA). Regim pemerintahan berganti. Kebijakan politik dekolonialisasi mulai diterapkan, termasuk di Timor Timur. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan itu tidak memiliki kesatuan konsep. Keadaan politik dalam negeri Portugal pun mulai bergejolak. Akibatnya, janji-janji untuk mengembalikan hak-hak sipil dan demokrasi, serta kebebasan membentuk partai politik di Timor Timur tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Proses dekolonialisasi yang tak kunjung usai ini sempat terhenti karena percaturan politik didalam negeri di Timor Timur dan campur tangan pemerintah Indonesia. Stagnasi proses dekolonialisasi terjadi karena persaingan-persaingan politik diantara partai-partai yang lahir setelah kudeta, dan kepentingan-kepentingan geopolitik negara-negara tetangganya (Australia dan Indonesia) yang berada di bawah bayang-bayang politik perang dingin, paling tidak telah diingkarinya keinginan negeri di bawah gunung Ramelau ini untuk merdeka.⁵ Puncaknya adalah perang saudara 1975, yang dipicu oleh kegagalan dekolonialisasi. Portugal akhirnya secara tidak bertanggung jawab meninggalkan Timor Timur.

Selama menjadi bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Timor Timur merupakan wilayah yang sarat dengan konflik separatisme. Konflik yang terjadi di Timor Timur ini intinya adalah meminta status dengan daerah otonomi luas bagi wilayahnya serta mempertahankan integrasi. Tetapi Partai Fretilin menginginkan kemerdekaan bagi Timor Timur dan menginginkan segera diadakan referendum. Fretilin adalah salah satu partai komunis di Timor Timur yang sangat tidak setuju dengan integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan

negeri. Gerakan diplomasi ini memperoleh perhatian yang khusus dari dunia internasional. Beberapa badan yang dimanfaatkan oleh Fretilin dalam melancarkan diplomasinya adalah Australia Congress for International Cooperation and Disarmament (IICD), semacam organisasi organisasi perdamaian yang dikuasai golongan kiri dalam kongres Australia; komite Angola dan komite Indonesia di Belanda; Freedom Fighters di Afrika; dan sebagainya. Melalui organisasi-organisasi inilah Fretilin dapat melebarkan jaringan kampanyenya ke Inggris, Amerika, Kanada, Afrika dan beberapa negara lainnya. Propaganda yang dilancarkan Fretilin menjadi sorotan dunia internasional, sehingga setiap terjadi pergolakan di Timor Timur Indonesia menjadi sorotan utama dunia internasional. Gerakan separatis yang dilakukan oleh Fretilin dapat dipadamkan pada masa pemerintahan Soeharto.

Tertangkapnya pimpinan Fretilin, Xanana Gusmao oleh Angkatan Bersenjata Indonesia tidak berarti Fretilin bubar, tetapi bersama-sama organisasi bawah tanah yang beroperasi di Timor Timur maupun di Indonesia, serta anggota partai politik lain yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur seperti UDT. Xanana sendiri divonis 20 tahun penjara, tapi sudah bebas setelah menjalani penjara selama 6 tahun. Dalam kalimat-kalimat sempalan pledoi Xanana tertulis:

“Keadaan saya sendiri, dimana segala gerak gerik saya dikontrol luar biasa ketatnya, mengingatkan saya pada pengontrolan total terhadap penduduk Dili dan terutama terhadap para pemuda Timor Timur yang heroik, yang diberlakukan segera sesudah pembantaian massal yang pengecut di Santa Cruz.” “Di Polwil, dimana mereka berusaha merayu saya dengan perhatian yang berlebihan, terdapat tulisan-tulisan inskripsi yang ditoreh dan digurat pada dinding-dinding sel tahanan, oleh para tahanan dan kawan-kawan yang mendampingi saya. Tulisan-tulisan itu demikian menggorekan kepangan saya pada derita mendalam

yang ditanggung oleh banyak kawan-kawan seperjuangan saya. Mereka semua adalah segala korban dari segala jenis penyiksaan, yang juga tetap mengingatkan saya kembali pada hari 12 Nopember 1991 yang tak terlupakan itu. Gelora kehendak jenis apa yang ada dalam demonstrasi damai pada 12 Nopember 1991 itu? Mengingat Jakarta dan dunia, akan betapa perlunya dialog perdamaian, mengingatkan Jakarta dan dunia, bahwa telah terjadi sesuatu yang sudah sedemikian parah bersalah di Timor Timur".⁷

Tekanan represif pada pemerintahan Soeharto waktu itu justru semakin memperkuat simpati rakyat Timor Timur untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan militer yang merupakan kebijakan Presiden Soeharto tersebut telah menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pada akhirnya menjadi senjata diplomasi bagi perjuangan kemerdekaan rakyat Timor Timur. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia digunakan oleh Fretilin sebagai alat propaganda dunia atau negara-negara anggota PBB sehingga mereka mendukung perjuangan rakyat Timor Timur dan memojokkan posisi Indonesia di dunia internasional.

Perjuangan diplomasi Indonesia untuk menyakinkan dunia internasional bahwa Timor Timur masih merupakan salah satu wilayah dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak membawa hasil yang menguntungkan. Akhirnya dengan sangat berat dan dibawah tekanan internasional, pemerintah Indonesia saat itu memberi dua opsi kepada rakyat Timor Timur untuk merdeka atau otonomi seluas-luasnya yang dilakukan melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 dan dibawah pengawasan dari badan PBB, dimana hasilnya sangat mengejutkan pemerintah Indonesia karena sebelum diadakannya proses

⁷ Kutipan dari Pidato dan Ringkasan Pembelaan Xanana Gusmao dalam Gerry Van Kinken, *Akar*

jajak pendapat dapat dilihat bahwa banyak sekali kampanye dukungan yang diarahkan kepada pemerintah Indonesia untuk tetap integrasi dengan Timor Timur, terbukti dengan banyaknya dukungan dari beberapa daerah di Timor Timur antara lain dari daerah Ermera, Baucau, Manufahi, Liquica, Dili, Oe-Cusse, Ainaro, Bobonaro, Lautem, Aileu, Covalima, dan daerah-daerah yang lain pendukung otonomi luas. Tapi yang terjadi Timor Timur merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada jajak pendapat tahun 1999 serta berhasil menyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk menduduki wilayah Timor Timur karena menurut mereka Indonesia telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat, sehingga meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain dengan jalan diplomasi yang mengalami kegagalan. Hal inilah yang dapat dimanfaatkannya Fretilin serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat melemahkan posisi Indonesia dalam dunia Internasional sehingga mau melepaskan Timor Timur untuk dapat berdiri sebagai negara baru yang merdeka, dan hal tersebut terbukti pada jajak pendapat 30 Agustus 1999. INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) menyesalkan bahwa pemerintah Indonesia gagal melaksanakan sebagian besar upaya-upaya yang dibuat di Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB.⁸ INFID membuat pernyataan tentang Timor Timur bahwa menurut hukum internasional, Timor Timur adalah satu wilayah tanpa pemerintahan sendiri (non-self-governing) yang statusnya

belum ditentukan. Satu langkah penting menuju penyelesaian adalah dijalankannya hak menentukan nasib sendiri melalui satu mekanisme yang adil dan damai dan yang dapat diterima oleh komunitas internasional.

Pelanggaran HAM memperoleh perhatian utama masyarakat internasional terkait erat dengan terjadinya perubahan situasi global pasca Perang Dingin, yang menjadikan isu HAM sebagai komoditas kampanye politik internasional yang krusial. Orientasi global tidak lagi menitikberatkan pada masalah-masalah politik. Amerika sebagai negara adidaya terpenting, terutama setelah keruntuhan Soviet, tidak lagi menetapkan komunisme sebagai musuh terbesar. Sebagai ganti isu melawan komunisme, AS beserta negara-negara Eropa Barat menempatkan isu-isu demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup sebagai bahan kampanye menekan negara-negara lain.⁹

Lepasnya Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia merupakan puncak dari serangkaian kemenangan diplomasi Fretilin sekaligus kegagalan diplomasi Indonesia. Strategi diplomasi Indonesia tentang Timor Timur mengabaikan penanganan media internasional sebagai pembentuk opini publik. Masalah utama kegagalan Indonesia dalam bidang HAM adalah banyaknya terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.¹⁰ Pelanggaran HAM mendapatkan perhatian utama masyarakat dunia terkait erat dengan adanya perubahan situasi global pasca Perang Dingin, yang menjadikan isu HAM sebagai komoditas kampanye politik

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah mengapa Fretilin memenangkan konflik Timor Timur dengan Indonesia?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menganalisa mengapa HAM di Timor Timur menjadi kunci kemenangan Fretilin, penulis mencoba menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan yang bisa memberikan gambaran tentang masalah tersebut diatas. Kerangka pikiran yang akan digunakan adalah Teori Persepsi.¹¹

Persepsi adalah mengambil atau menerima sesuatu yang tampak/eksis yang merujuk pada obyek partikular, citra-citra, sensasi-sensasi individual pada hal-hal konkrit dalam pengalaman.¹² Sedangkan teori persepsi berasumsi bahwa naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau citra yang dimiliki individu bersifat dinamik yang memberikan dasar tindakan dari apa yang diketahui dan diterima dari lingkungannya yang dipadukan dengan faktor psikologis terhadap citra yang telah dimiliki sebelumnya. Ketika kita bereaksi terhadap dunia di sekitar kita, menurut Kenneth Bouilding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia, sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda-beda.¹³ Yang

¹¹ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1989, hal.19-37.

¹² Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal. 244.

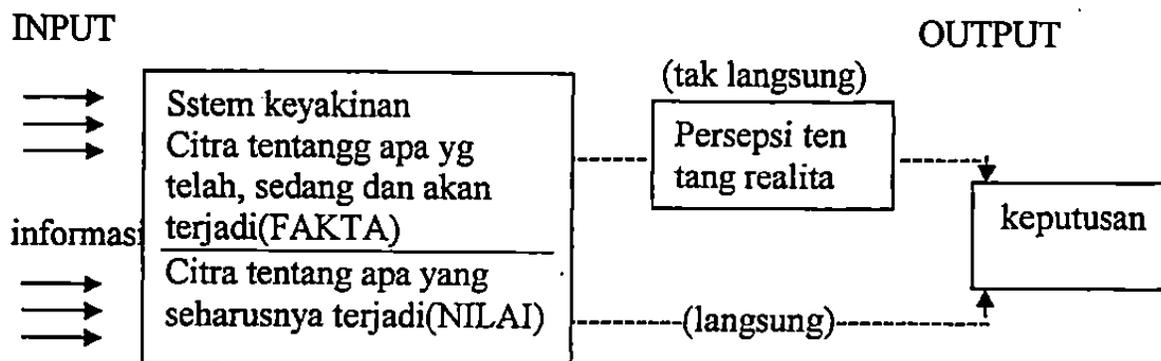
menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia ini.¹⁴ jadi orang melakukan tindakan berdasarkan pada apa yang mereka ketahui. Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang kenyataan. Persepsi yang telah ada mempunyai arti penting terhadap penerimaan sudut-sudut pandang yang bisa menjelaskan suatu sikap perilaku politik seseorang. Menurut Bruce Russett dan Harvey Starr, terdapat hubungan antara persepsi dengan perilaku politik aktor internasional dalam politik internasional¹⁵ yaitu tahap pertama adalah timbulnya suatu situasi, yaitu timbulnya suatu masalah. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh para pembuat keputusan, ada tiga hal yang terjadi:

1. Suatu masalah pasti mengandung stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang disebut "Trigger Event".
2. Stimulus yang ada dipersepsi dengan menyeleksi, menata, dan menilai informasi yang masuk tentang lingkungannya.
3. Stimulus yang telah dipersepsi ditafsirkan, yang penafsirannya tergantung pada citra yang ada dalam benak sipembuat keputusan.

Ole R. Holsti membuat diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan seperti terlihat dalam gambar I.

¹⁴ *Journal of Public International Law, Sullivan, International Relations: Theory and Evidence*

Gambar I: Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan Pembuatan Keputusan Politik luar Negeri



Sumber: Ole R. Holsti, "The Belief System and National Images: A Case Study", dikutip dalam Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics*, (New York: Freeman, 1985), hal.304.

Tanggapan seseorang terhadap suatu situasi, atau suatu stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para pembuat keputusan, seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologik yang mempengaruhi persepsi (misalnya, kehendak untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan sebagainya), dan proses psikologik lain yang membentuk kepribadiannya.

Mispersepsi terdapat dalam teori persepsi. Mispersepsi terjadi jika perilaku negara atau pembuat keputusan negeri itu dipandang secara berbeda dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan atau ketika maksud mereka diinterpretasikan secara berbeda dengan yang sebenarnya mereka maksudkan. Mispersepsi juga terjadi karena citra dengan cara-cara tertentu mencegah masuknya nilai-nilai penting dengan cara mengabaikan sama sekali, menginterpretasikan dengan salah atau merubah informasi yang ada agar sesuai atau cocok dengan citra yang telah ada dengan tujuan mendapatkan konsistensi kognitif, yaitu pengusahaan agar citra

subyektif dari dunia politik yang diinginkan. Dimana Indonesia pada satu pihak dengan persepsi Fretilin sebagai gerakan separatis dan pihak-pihak lain termasuk Fretilin, PBB, Australia, Amerika Serikat, dan lain-lain negara dan organisasi sebagai aktor internasional yang memiliki persepsi Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur.

Persengketaan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Fretilin menimbulkan berbagai pelanggaran HAM yang berat, mulai dari Integrasinya dengan Indonesia pada 1976 sampai pada kemerdekaannya tahun 1999. Hal itu sangat terkait dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pendekatan militer yang dilakukan oleh Rezim Soeharto menyebabkan rakyat Timor Timur merasakan tekanan yang represif baik secara sosial maupun politik, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM. Pembangunan-pembangunan di Timor Timur di berbagai bidang, guna kesejahteraan rakyat Timor Timur malah dianggap telah banyak menyengsarakan rakyat Timor Timur. Strategi diplomasi Indonesia di Timor Timur mengabaikan penanganan media internasional sebagai pembentuk opini publik, ditambah lagi dengan adanya tekanan dari dunia internasional yang telah dikondisikan oleh citra (baik oleh karena diplomasi Fretilin maupun melalui pengamatan empiris mereka) bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur dan berhasil digunakan oleh Fretilin untuk mengadakan jajak pendapat pada tahun 1999 yang akhirnya dimenangkan oleh pihak pro kemerdekaan, membuktikan bahwa citra yang ada di masyarakat internasional dapat digunakan oleh Fretilin menjadi senjata penekan masyarakat internasional

F. Hipotesa

Berdasarkan Teori dan konsep di atas dapat ditarik suatu hipotesa bahwa, Fretilin dapat menggunakan isu hak asasi manusia yang sedang mengglobal dalam meyakinkan rakyat Timor Timur untuk berpisah dari Indonesia.

G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan dalam penulisan ini adalah peristiwa yang dimulai dari tahun 1910 ditandai dengan Perang manufahi, 1976 mulainya Integrasi Timor Timur ke Indonesia sampai pada kemerdekaannya tahun 1999 yang lebih menekankan pada pelanggaran terhadap HAM khususnya pada era setelah berakhirnya Perang Dingin dan upaya diplomasi Fretilin dalam dunia Internasional sehingga menimbulkan persepsi internasional bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Akan tetapi penulis juga tidak menutup kemungkinan untuk menulis peristiwa yang terjadi di luar tahun tersebut di atas.

H. Metode Pengumpulan Data

Dengan berdasarkan kerangka dasar pemikiran, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris, penelitian ini menggunakan metode deduktif. Data-data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi literatur. Oleh karena itu, data yang akan disajikan adalah data yang bersumber dari analisa data sekunder seperti : buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah,

majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, web site maupun referensi-referensi lainnya yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang alasan pemilihan judul yaitu sebab-sebab penulis memilih judul skripsi ini, tujuan penulisan adalah untuk apa skripsi itu dibuat, latar belakang masalah; yaitu menggambarkan masalah yang akan dibicarakan dalam skripsi ini, pokok permasalahan yaitu masalah apa yang akan dibahas, kerangka dasar Pemikiran yaitu berupa alat menganalisa atau alat yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi, hipotesa yang memuat jawaban umum dalam penulisan skripsi, jangkauan penulisan yaitu memuat waktu dari kapan sampai kapan masa yang akan di bahas dan dijadikan referensi oleh penulis, dan sistematika penulisan yaitu berisi gambaran data-data yang akan dikembangkan atau ditulis dalam penelitian.

Bab II berisi pembahasan tentang hak asasi manusia yang terdiri dari pengertian hak asasi manusia, hak asasi manusia sebagai isu internasional yang sangat krusial, pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terdiri dari pola pelanggaran hak asasi manusia, dan bukti dan fakta utama pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur..